

MEMBANGUN FONDASI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Kuliah Umum
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, 5 Januari 2017



OUTLINE

1. PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI
2. KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN
3. KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN POTRET ACEH
4. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
5. REFORMASI STRUKTURAL & KESIMPULAN



PENJAGAAN TERBAIK BAGI GENERASI MUDA ADALAH CONTOH YANG BAIK BAGI GENERASI TUA - *CUT NYAK DHIEN*

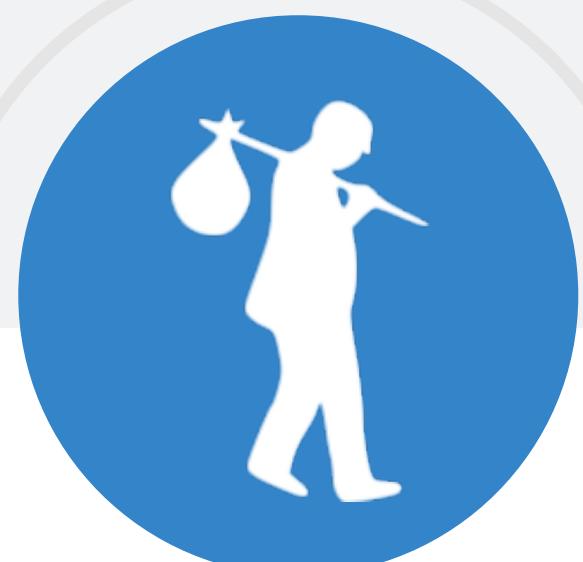
PERKEMBANGAN EKONOMI TERAKHIR

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA



MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR

MENGENTASKAN
KEMISKINAN



MENGURANGI
KETIMPANGAN



MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS DAN
DAYA SAING

RISIKO EKONOMI SALAH SAMA

5

Tingkat Inovasi
yang rendah



Kapasitas
produksi yang
terbatas



Produktifitas
rendah

Infrastructure,
Technology,
and Skill Gap



Daya saing
rendah

Pasar keuangan
dangkal



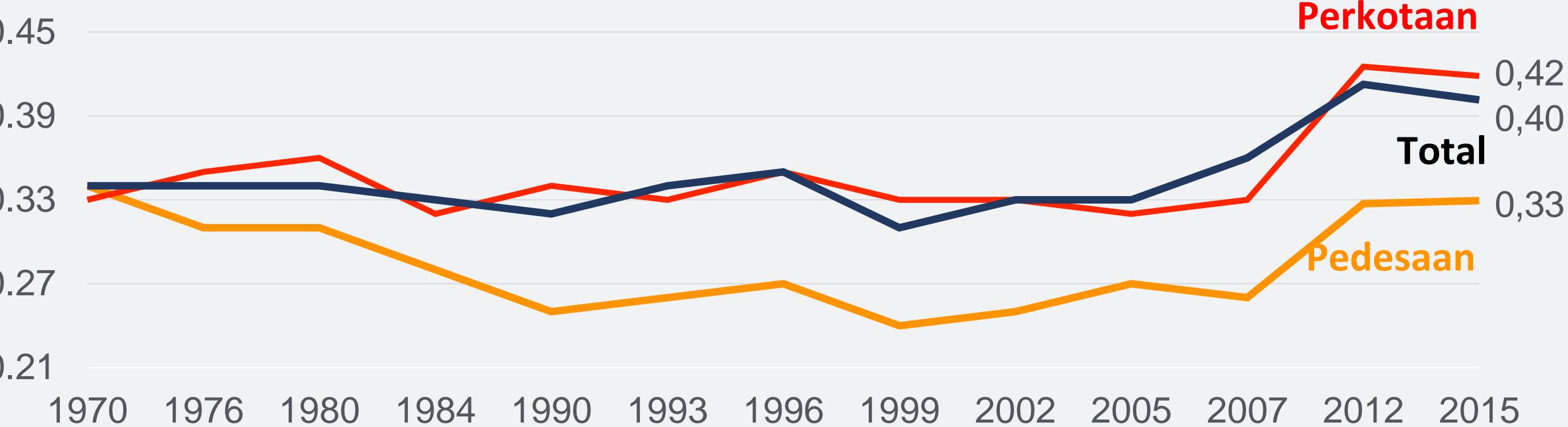
Kemiskinan dan
ketimpangan

POTRET KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Tingkat Kemiskinan



Tingkat Ketimpangan



Source: BPS, Bapennas

POTENSI RISIKO GLOBAL

Economic rebalancing
Tiongkok

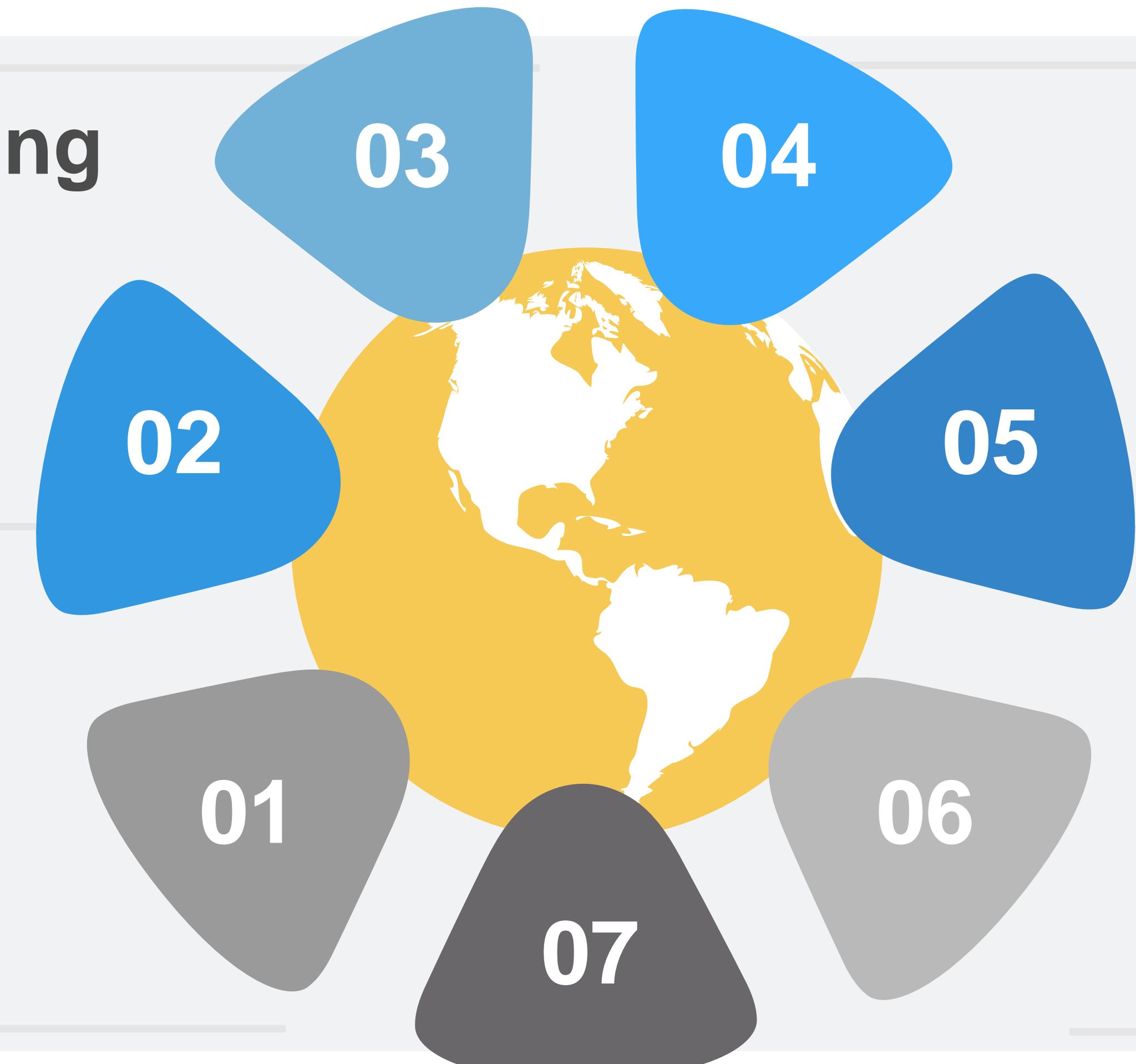
Harga komoditas
yang rendah

Tingkat permintaan
yang lemah

Isu geopolitik, co.
Brexit

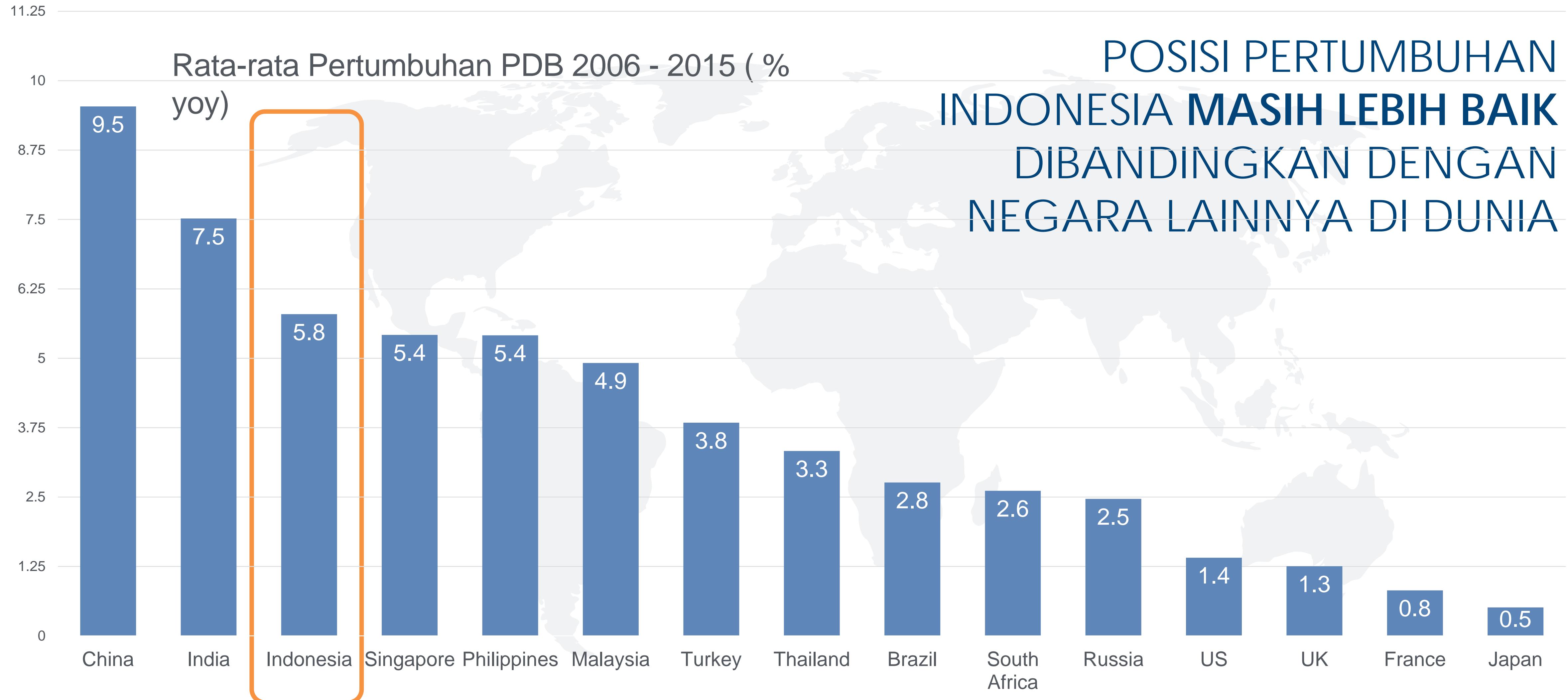
Kebijakan ekonomi
AS di bawah
pemerintahan baru

Kenaikan suku
bunga the Fed



**Pembalikan arus modal
dari EME's**

PERTUMBUHAN PDB DI DUNIA



PERTUMBUHAN PDB INDONESIA 2016



KONSUMSI RT DAN PMTB MENJADI PENDORONG PERTUMBUHAN

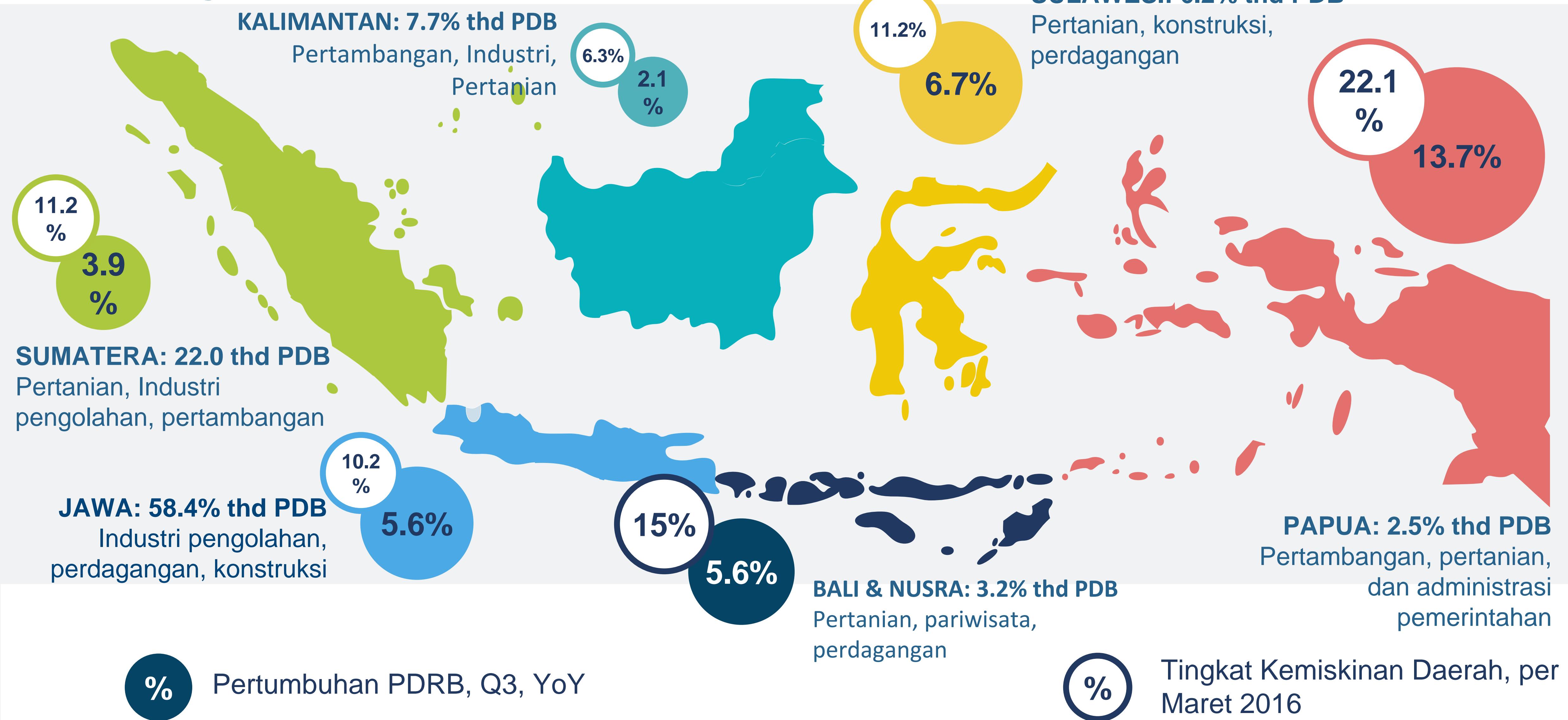
	2015						2016			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Ytd Q3	Tahun	Q1	Q2	Q3	Ytd Q3
Kons RT dan LNPRT	4,7	4,7	5,0	5,0	4,8	4,8	5,0	5,1	5,0	5,0
Kons Pemerintah	2,9	2,6	7,1	7,3	4,4	5,4	3,5	6,2	-3,0	2,0
PMTB	4,6	3,9	4,8	6,9	4,4	5,1	5,6	5,1	4,1	4,9
Ekspor	-0,6	0,0	-0,6	-6,4	-0,4	-2,0	-3,5	-2,4	-6,0	-4,0
Impor	-2,2	-7,0	-5,9	-8,1	-5,1	-5,8	-5,0	-2,9	-3,9	-3,9
PDB	4,73	4,66	4,74	5,04	4,71	4,79	4,91	5,19	5,02	5,04

SELURUH SEKTOR TUMBUH POSITIF PADA

TD IIIA II ARI III 001 C

Pertumbuhan PDB per Sektor (%, YoY)	2015						2016			
	Q1	Q2	Q3	s.d. Q3 (ytd)	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	s.d. Q3 (ytd)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.0	6.9	3.3	4.7	1.6	4.0	1.8	3.4	2.8	2.7
Pertambangan dan Penggalian	-1.3	-5.2	-5.7	-4.1	-7.9	-5.1	-0.8	-0.1	0.1	-0.2
Industri Pengolahan	4.0	4.1	4.5	4.2	4.4	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6
Konstruksi	6.0	5.4	6.8	6.1	8.2	6.6	7.9	6.2	5.7	6.6
Perdagangan Besar dan Eceran	4.1	1.7	1.4	2.4	2.8	2.5	4.1	4.1	3.7	3.9
Transportasi & Pergudangan	5.8	5.9	7.3	6.3	7.7	6.7	7.9	6.9	8.2	7.7
Informasi dan Komunikasi	10.1	9.7	10.7	10.2	9.7	10.1	8.1	9.8	9.2	9.0
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.6	2.6	10.4	7.2	12.5	8.5	9.3	13.6	8.8	10.5
Jasa-jasa lainnya	5.1	6.5	5	5.6	5.9	5.6	6	5.4	4.3	5.2
PDB	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	4.8	4.9	5.2	5.0	5.0

MESKI EKONOMI TUMBUH TINGGI, DISPARITAS DAERAH MASIH LEBAR



KESEHATAN FUNDAMENTAL EKONOMI

TED MCGA

Inflasi terkendali & pasar keuangan stabil



- Inflasi tahun 2016 3,02%
- Apresiasi Rupiah 2016 2,6%
- Pertumbuhan IHSG 2016 15,3%

Investasi langsung terus meningkat



- Triwulan III 2016:
- PMA Rp. 295 T, tumbuh 10,7%
- PMDN Rp. 158 T, tumbuh 18,8%
- Total Rp. 453 T, tumbuh 13,4%

Surplus neraca pembayaran



- Triwulan III 2016:
- Surplus neraca pembayaran USD5,7 miliar
- Surplus neraca modal dan keuangan USD9,4 miliar
- Defisit transaksi berjalan USD4,5 miliar (1,8% thd

Cadangan devisa memadai



- PDB)
- Posisi cadangan devisa Nov 2016 USD111,5 miliar
- Cukup membiayai 8,1 bulan impor dan pembayaran ULN



REFORMASI
FISKAL

REFORMASI
STRUKTURAL

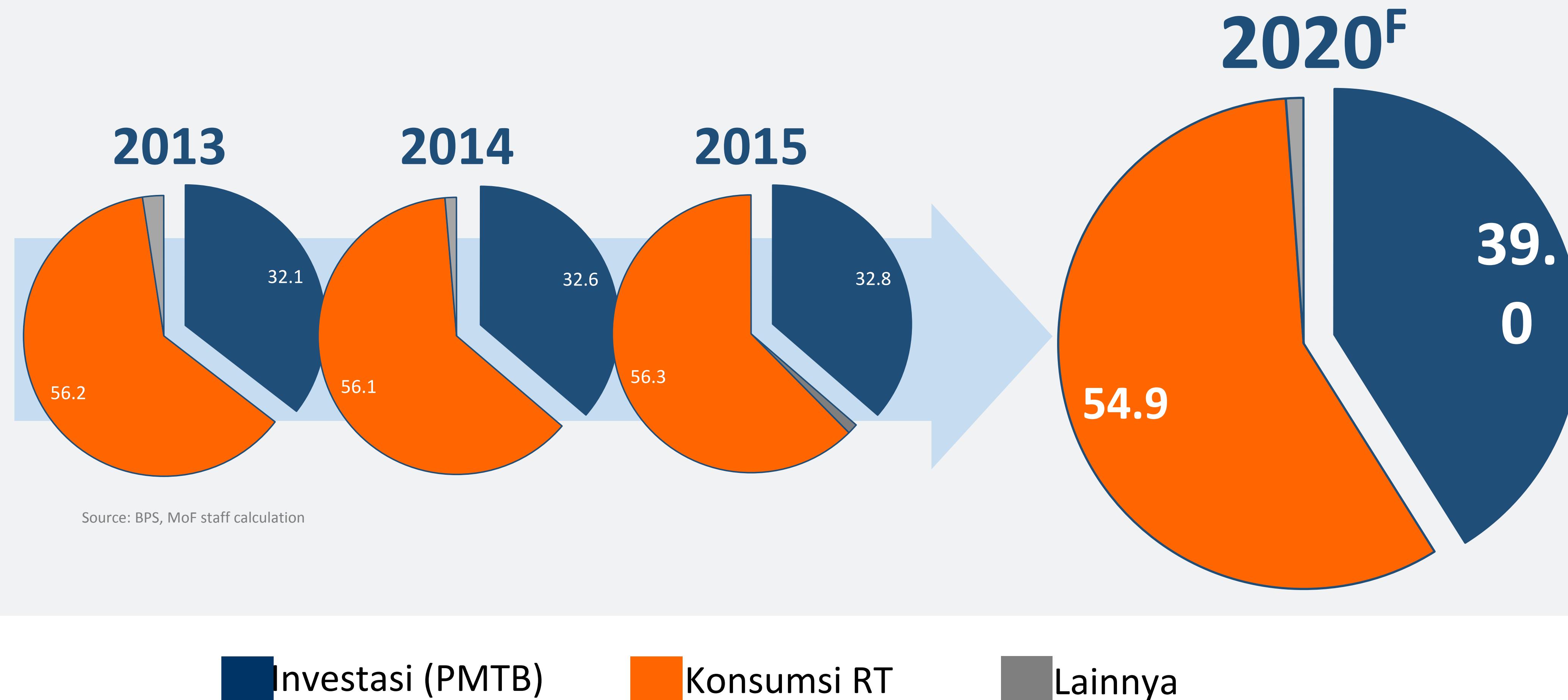
KEBIJAKAN
MONETER
YANG AKOMODATIF
DAN INDEPENDEN



GROWTH
FRIENDLY
ECONOMIC POLICY

MENGGESER SUMBER PERTUMBUHAN DARI CONSUMPTION LED GROWTH MENJADI INVESTMENT LED GROWTH

Kontribusi terhadap PDB (%)



APBN SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

#APBN2017

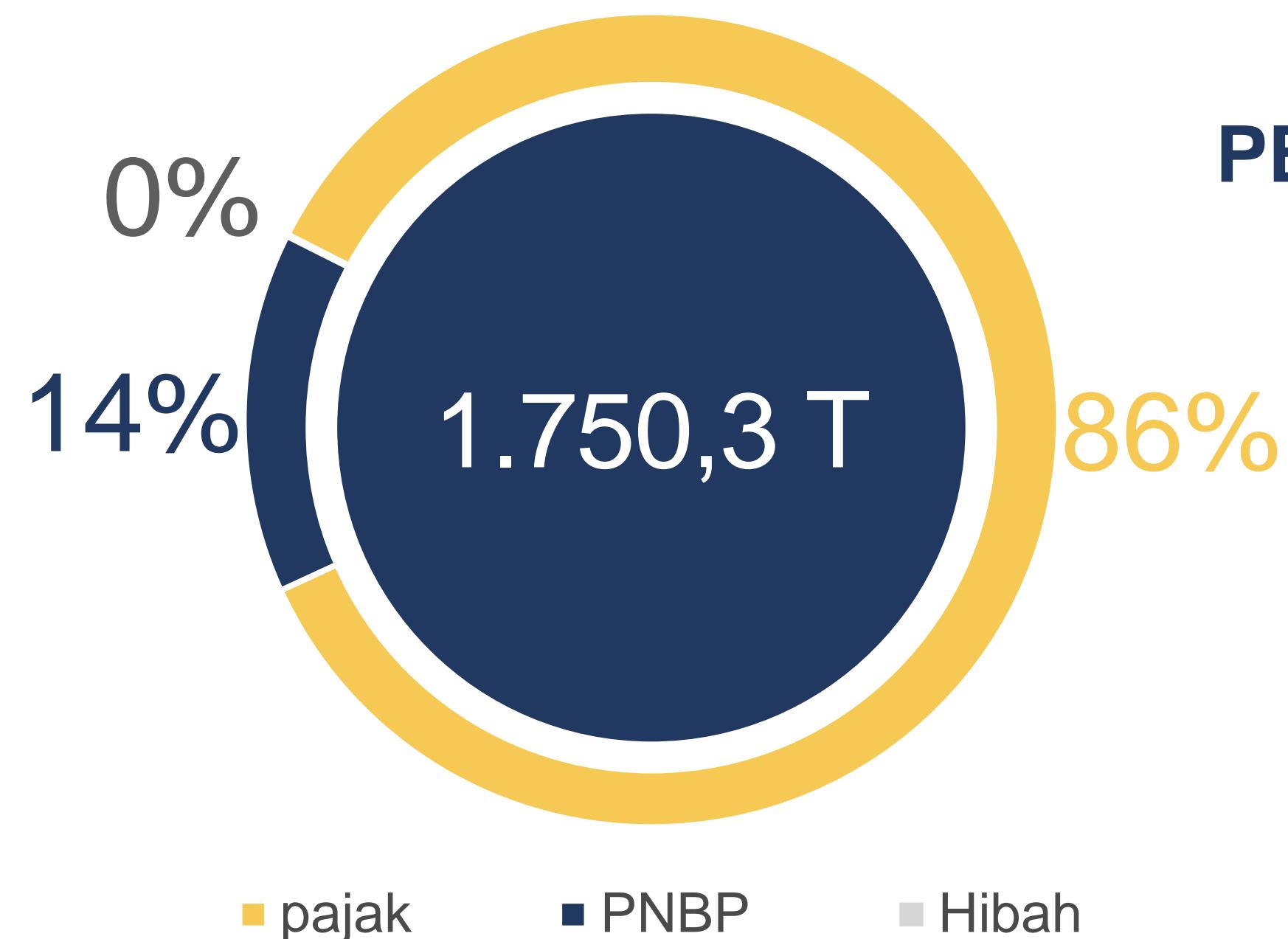
Pokok-pokok anggaran disusun secara cermat
untuk menghasilkan APBN kredibel, pruden, kuat
dan terpercaya demi kemakmuran bangsa

www.kemenkeu.go.id/APBN2017

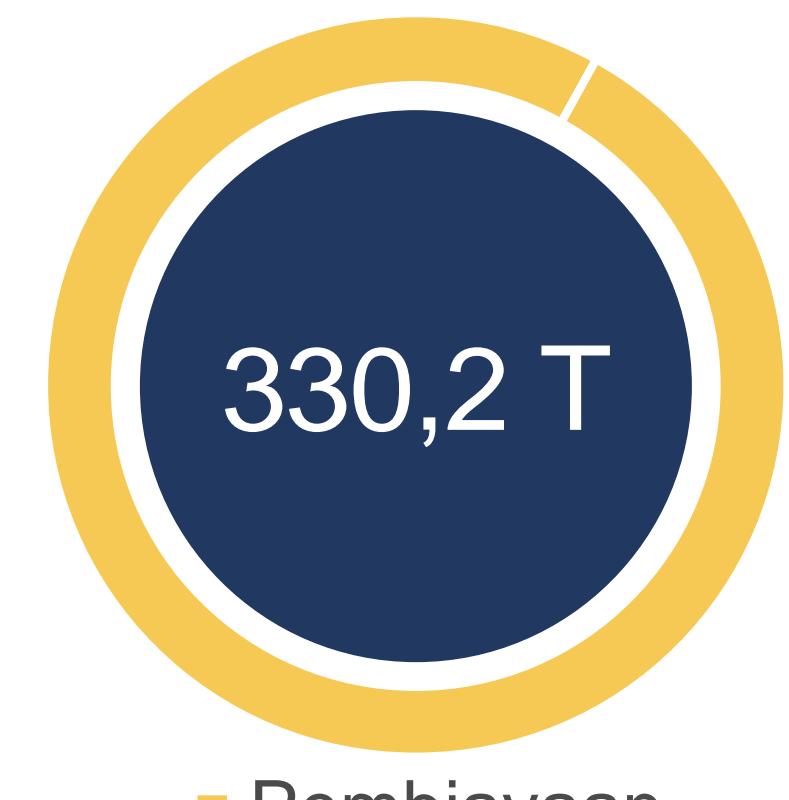


APBN SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL

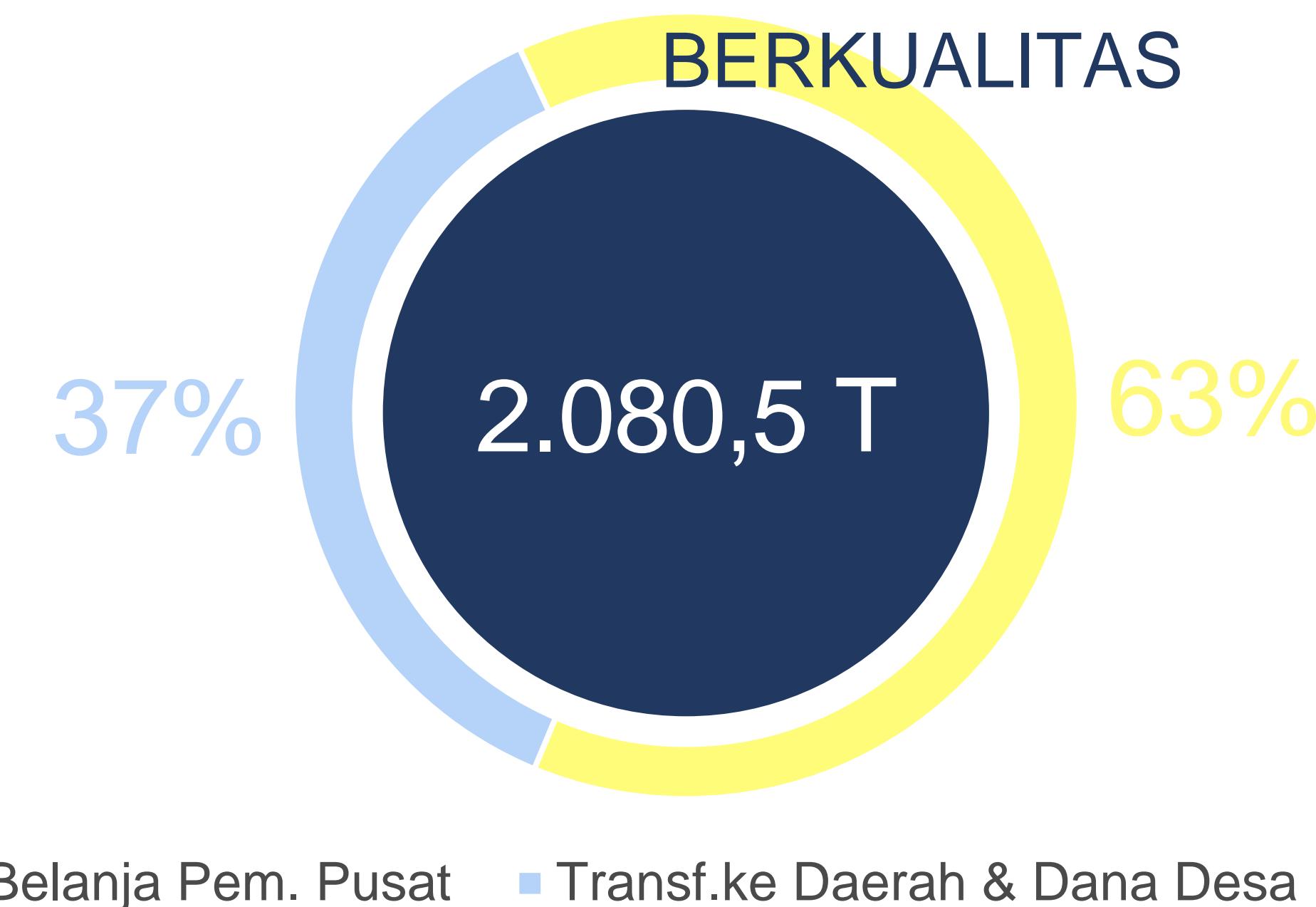
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA



PENGELOLAAN PEMBIAYAAN YANG PRUDEN



BELANJA NEGARA YANG PRODUKTIF DAN BERKUALITAS



APBN YANG KREDIBEL, EFISIEN DAN EFEKTIF, SERTA BERKESINAMBUNGAN

STIMULUS YANG OPTIMAL BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2016 - 2017

	2016 Realisasi	2017 APBN	
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,0*	5,1	↑
Inflasi (%, yoy)	3,02	4,0	↑
SPN 3 Bulanan (%)	5,7	5,3	↓
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.307	13.300	↑
ICP (US\$/barrel)	40	45	↑
Lifting Minyak (ribuan barrel/hari)	829	815	↓
Lifting Gas (setara dgn ribuan barrel minyak/hari)	1.184	1.150	↓

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh lembaga internasional:

- IMF 5,1%
- World Bank 5,3%
- Bloomberg consensus 5,3%

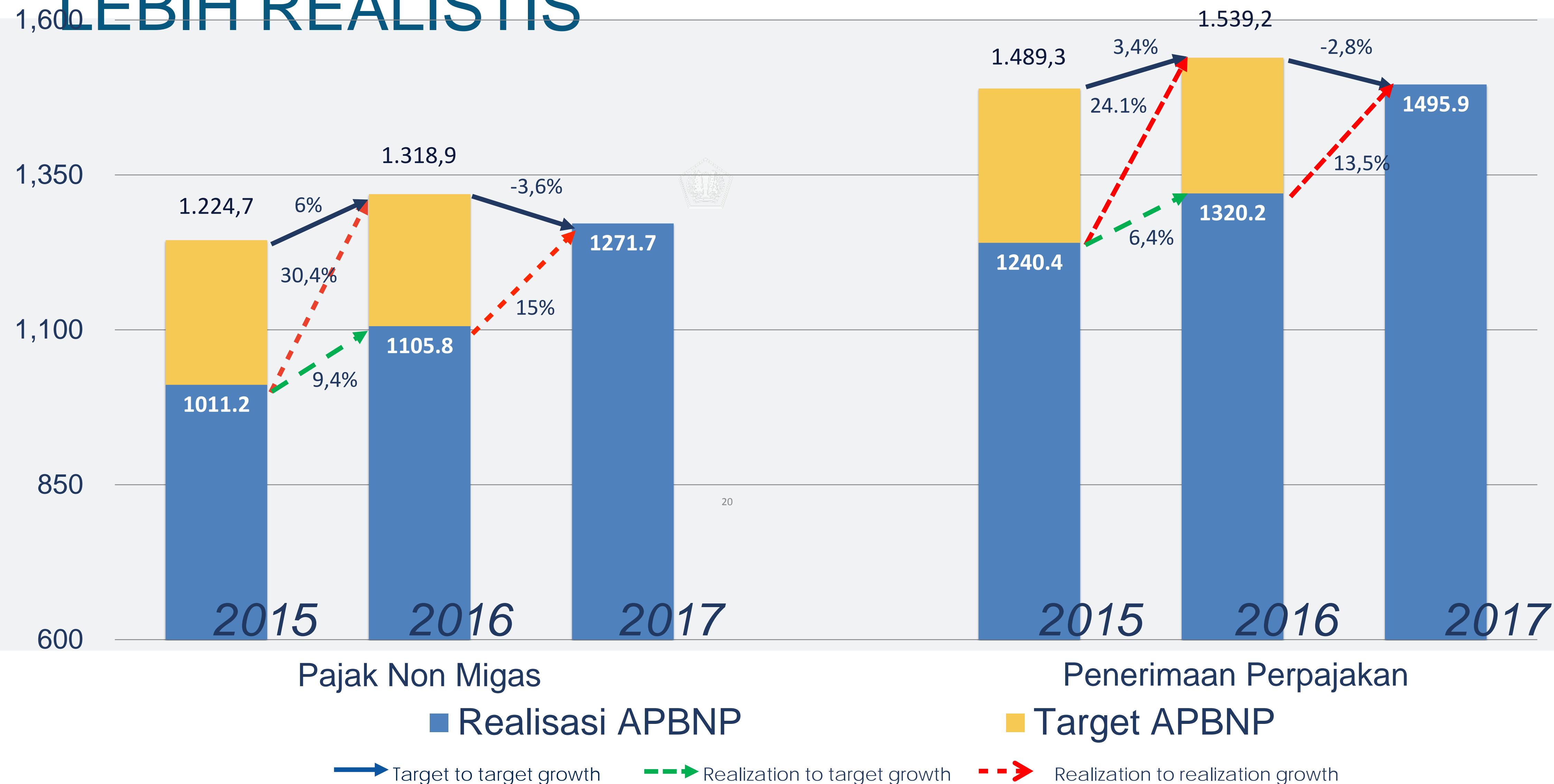
*) perkiraan

POSTUR REALISASI APBN-P 2016 & APBN 2017

	Deksripsi (Triliun Rupiah)	2016		2017	
		APBN-P	Outlook	Realisasi Sementara	APBN
A.	Pendapatan Negara	1.786,2	1.582,9	1.551,8	1.750,3
	I. Penerimaan Dalam Negeri	1.784,2	1.580,9	1.546,0	1.748,9
	1. Penerimaan Pajak	1.539,2	1.320,2	1.283,6	1.498,9
	2. PNBP	245,1	260,7	262,4	250,0
	II. Hibah	2,0	2,0	5,8	1,4
B.	Belanja Pemerintah	2.082,9	1.898,6	1.859,5	2.080,5
	I. Pemerintah Pusat	1.306,7	1.195,3	1.148,6	1.315,5
	1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)	767,8	672,0	677,6	763,6
	2. Belanja Non K/L	538,9	523,3	471,0	552,0
	II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	776,3	703,3	710,9	764,9
	1. Transfer Ke Daerah	729,3	659,1	664,2	704,9
	2. Dana Desa	47,0	44,2	46,7	60,0
C.	Keseimbangan Primer	(105,5)	(126,4)	(124,9)	(109,0)
D.	Surplus/Defisit	(296,7)	(315,7)	(307,7)	(330,2)
	% terhadap PDB	(2,35)	(2,50)	(2,46)	(2,41)
E.	Pembiayaan	296,7	315,7	330,3	330,2
	I. Pembiayaan Utang	371,6	387,8	n/a	384,7
	II. Pembiayaan Investasi	(94,0)	(91,5)	n/a	(47,5)
	III. Pembiayaan Lainnya	19,1	19,4	n/a	(7,0)



PERHITUNGAN TARGET PENERIMAAN YANG LEBIH REALISTIS



KEBIJAKAN PAJAK

MENGAPA MEMBAYAR PAJAK



Sarana mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur



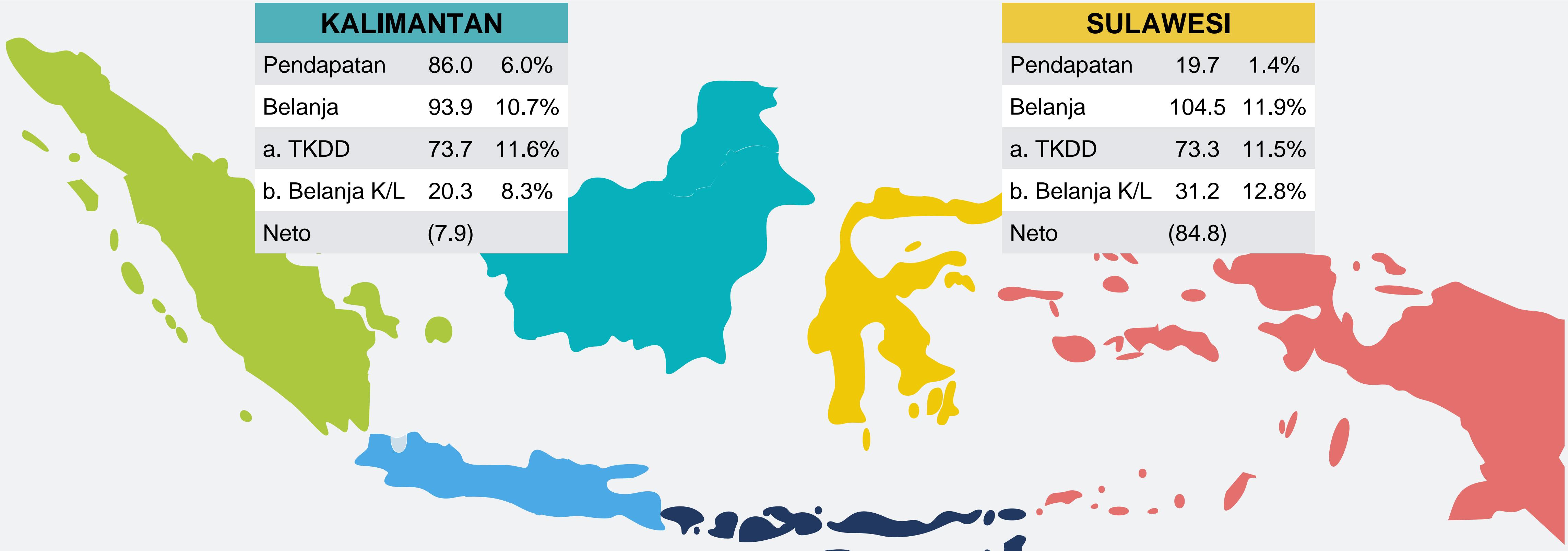
Sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional

SIAPA PEMBAYAR PAJAK



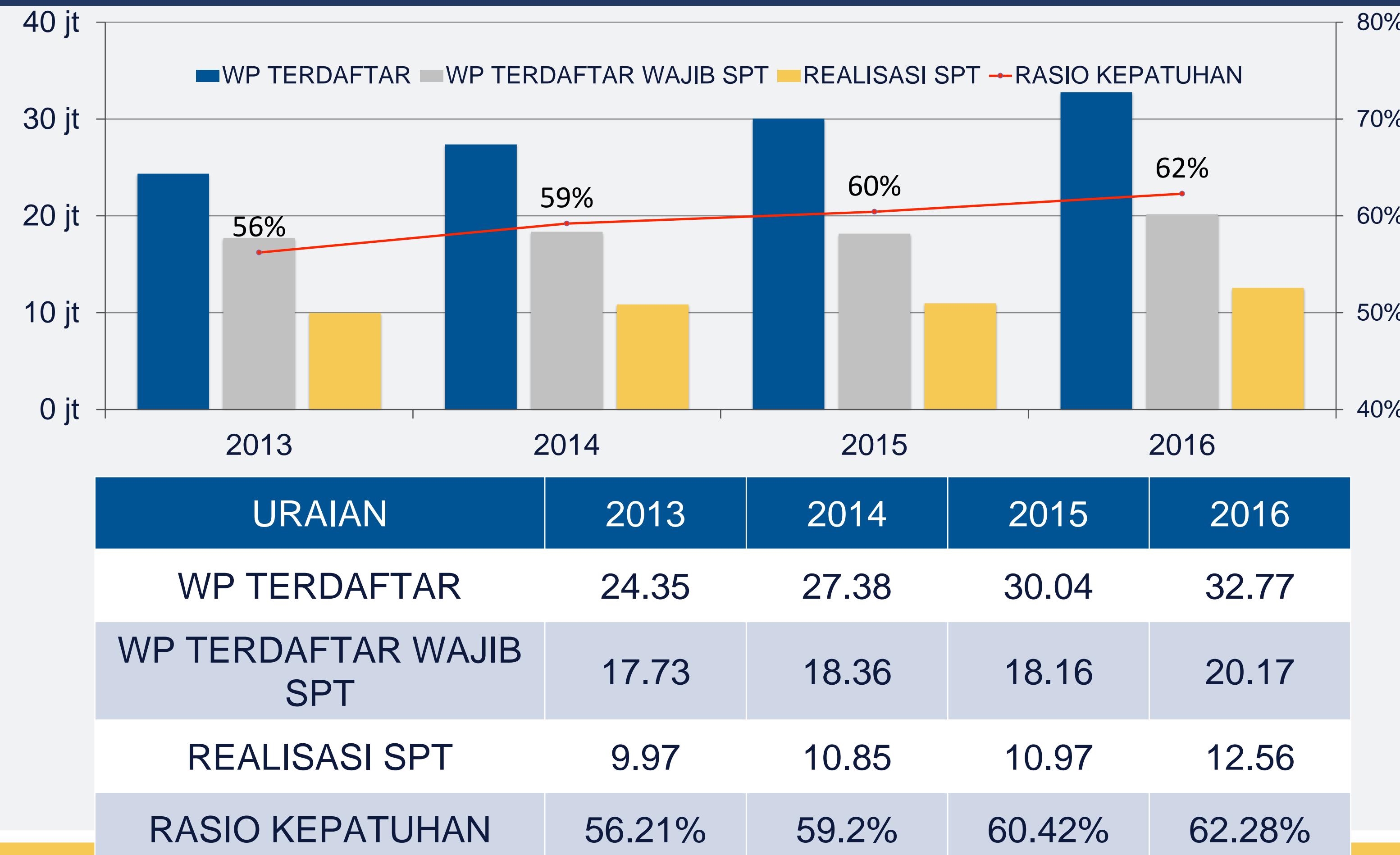
Merupakan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945

PAJAK UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN

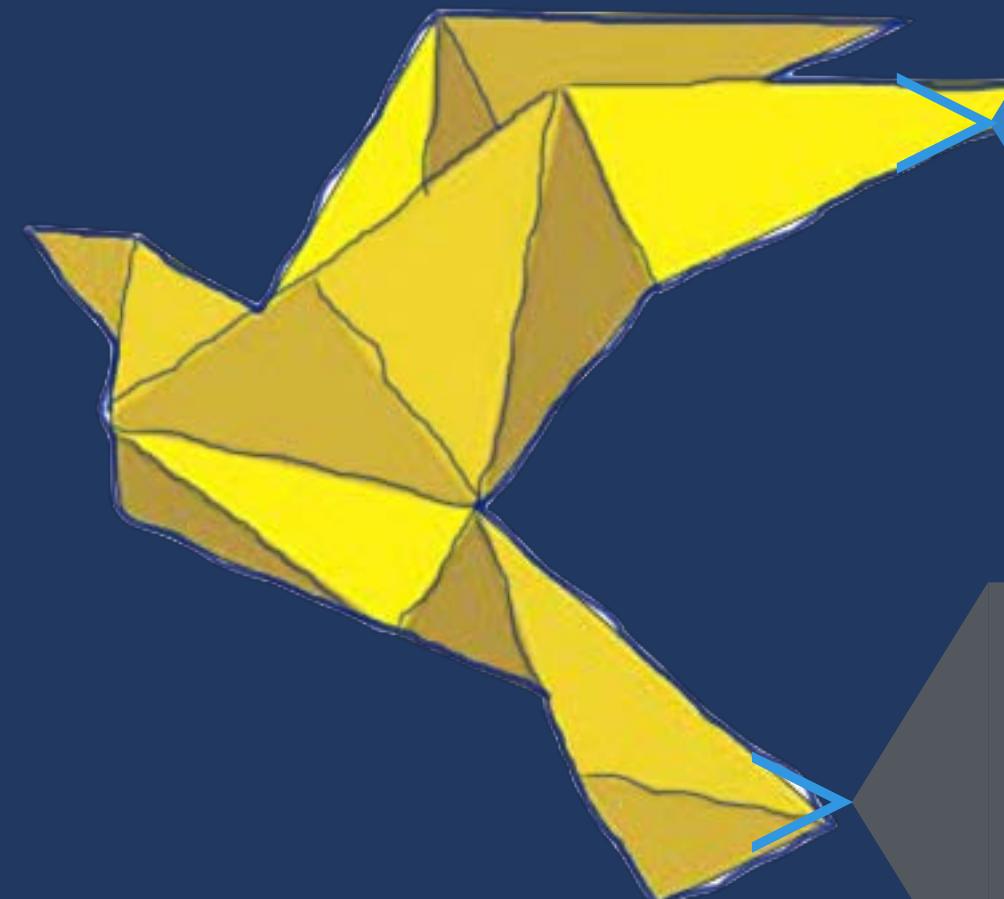


SUMATERA			JAWA			BALI & NUSRA			PAPUA & MALUKU		
Pendapatan	141.1	10.1%	Pendapatan	1143. 2	80.1%	Pendapatan	15.5	1.1%	Pendapatan	18.4	1.3%
Belanja	232.3	30.5%	Belanja	302.8	34.4%	Belanja	56.4	6.4%	Belanja	89.6	10.2%
a. TKDD	176.1	27.7%	a. TKDD	201.8	31.7%	a. TKDD	39.5	6.2%	a. TKDD	71.7	11.3%
b. Belanja K/L	56.2	23.1%	b. Belanja K/L	101	41.5%	b. Belanja K/L	17.0	7.0%	b. Belanja K/L	17.9	7.3%
Neto	(88.2)		Neto	(92.8)		Neto	(40.0)		Neto	(71.2)	

KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT



AMNESTI PAJAK



- Mendukung pertumbuhan ekonomi
- Memperluas tax base

- Memperbaiki penerimaan negara
- Memperbaiki hubungan dan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah

NILAI ASET



UANG TEBUSAN

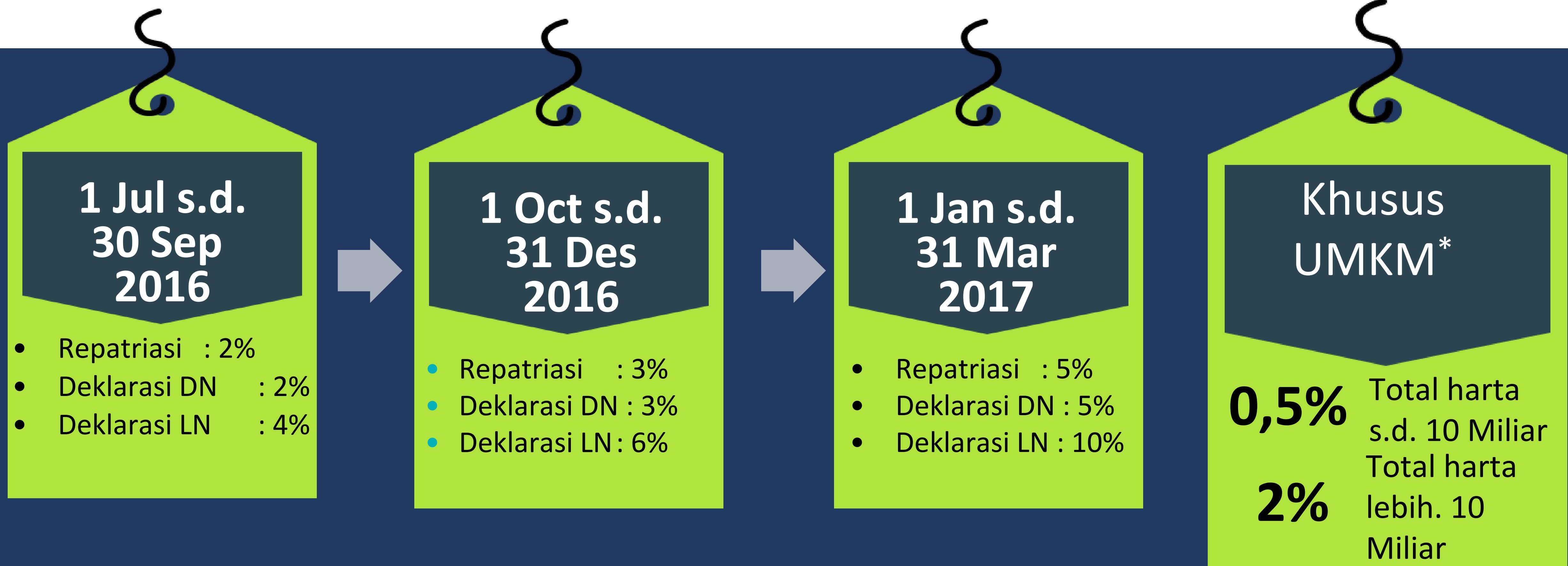


Data hingga 31 Desember 2016

PESERTA



TARIF UANG TEBUSAN AMNESTI PAJAK



Berlaku dari 1 Juli
2016
s.d. 31 Maret 2017

REFORMASI PERPAJAKAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF



Reformasi Kebijakan

- Revisi **UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
- Revisi **UU PPN**
- Revisi **UU PPH**
- Revisi **UU Bea Materai**



Reformasi Administrasi

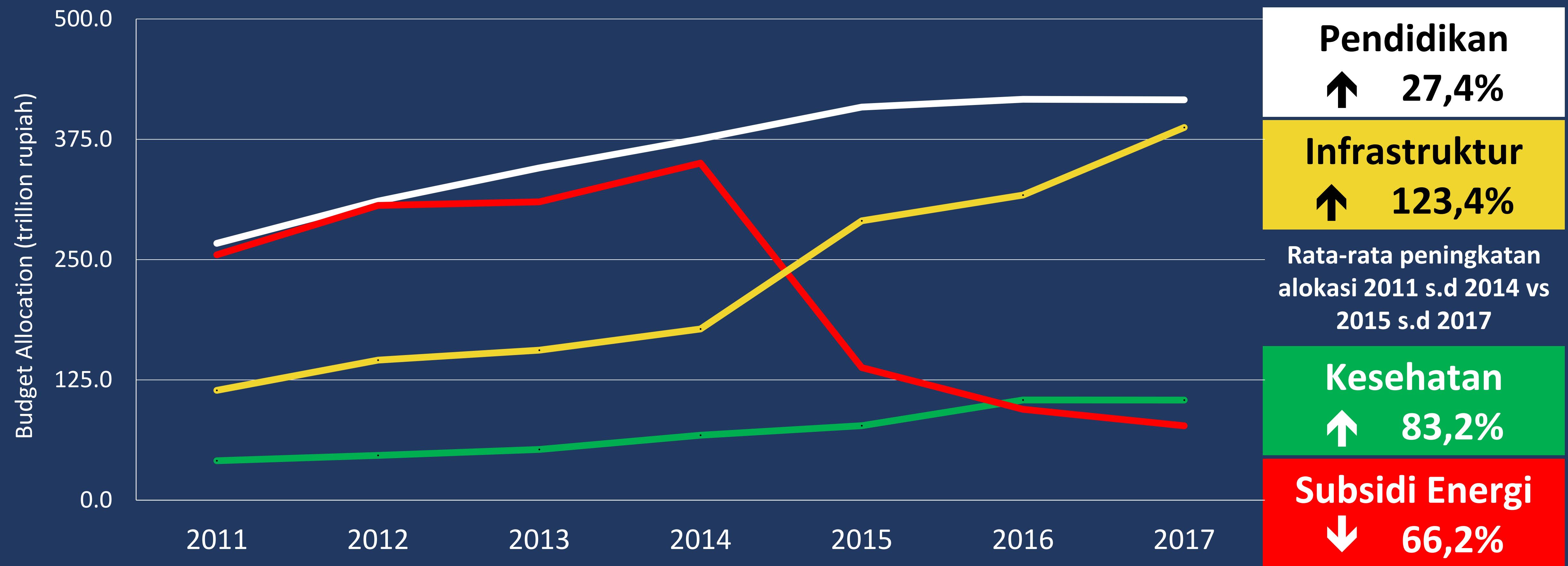
- Peningkatan efektivitas penegakan hukum
- Peningkatan kualitas sistem IT perpajakan
- Manajemen database pajak yang lebih baik
- Perbaikan kapasitas dan kapabilitas SDM

BELANJA NEGARA

Instrumen fiskal dalam menstimulus pembangunan dengan mengutamakan kestabilan perekonomian dalam negeri.



PERBAIKAN KUALITAS BELANJA APBN MENJADI PRIORITAS



PENGGUNAAN PAJAK PADA BELANJA K/L

3.541m
jembatan



155 km
jalan



52.631 ha
sawah



11.900
rumah prajurit



9,4 ribu
gaji guru senior



10 ribu
Gaji Polri setahun



**infrastruktur
subsidi**



**belanja pegawai
bantuan sosial**



729 ribu^{RTS}
beras



93 ribu ton
benih



306 ribu ton
pupuk



**2,2 juta/
1,3 juta/1 juta**
siswa SD/SMP/SMA



355 ribu
keluarga miskin

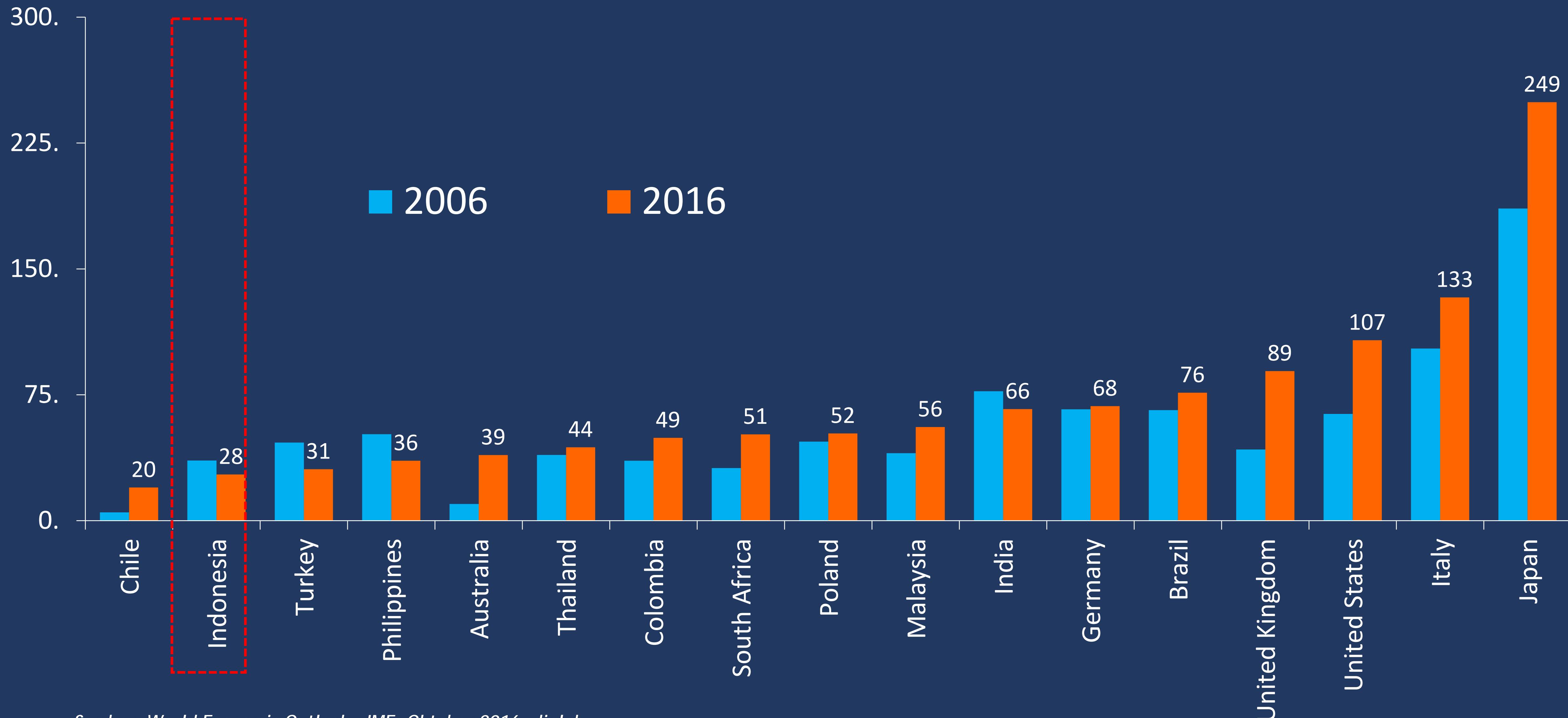


3,6 juta PBI
orang miskin

PENGGUNAAN PAJAK PADA TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA

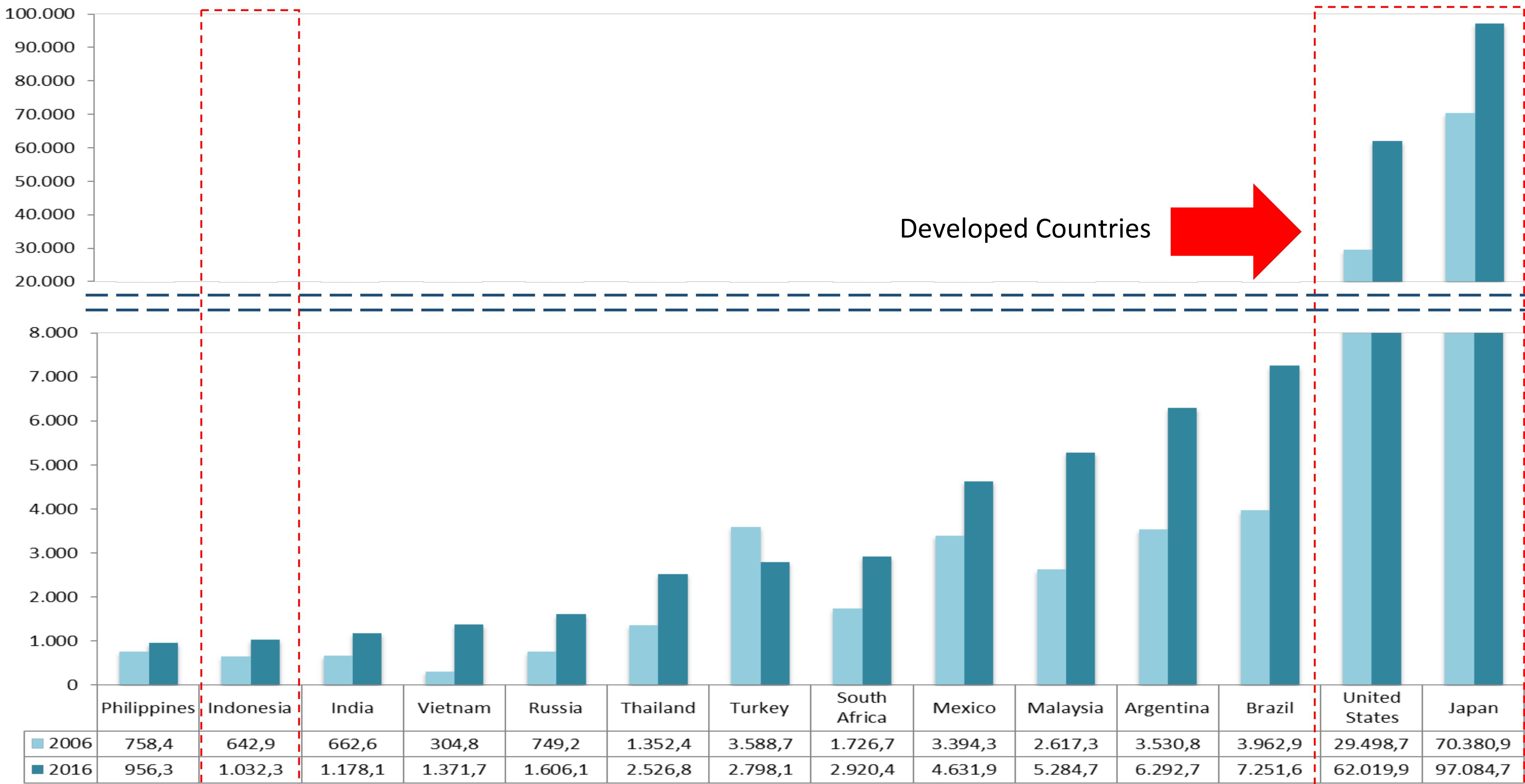


RASION UTANG PUBLIK TERHADAP PDB (%)



UTANG PEMERINTAH PER KAPITA

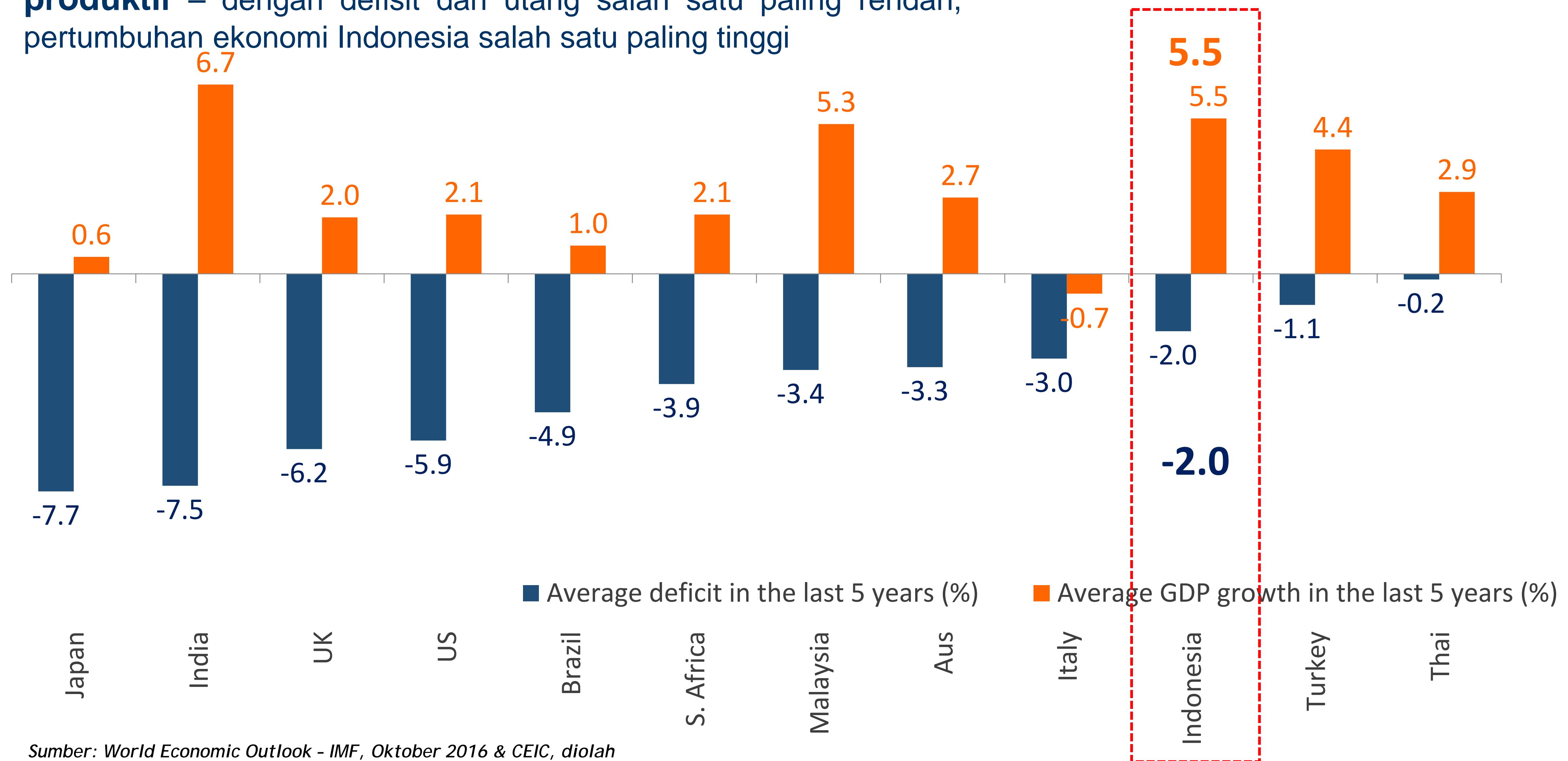
Dalam USD



Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2016 & CEIC, diolah

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

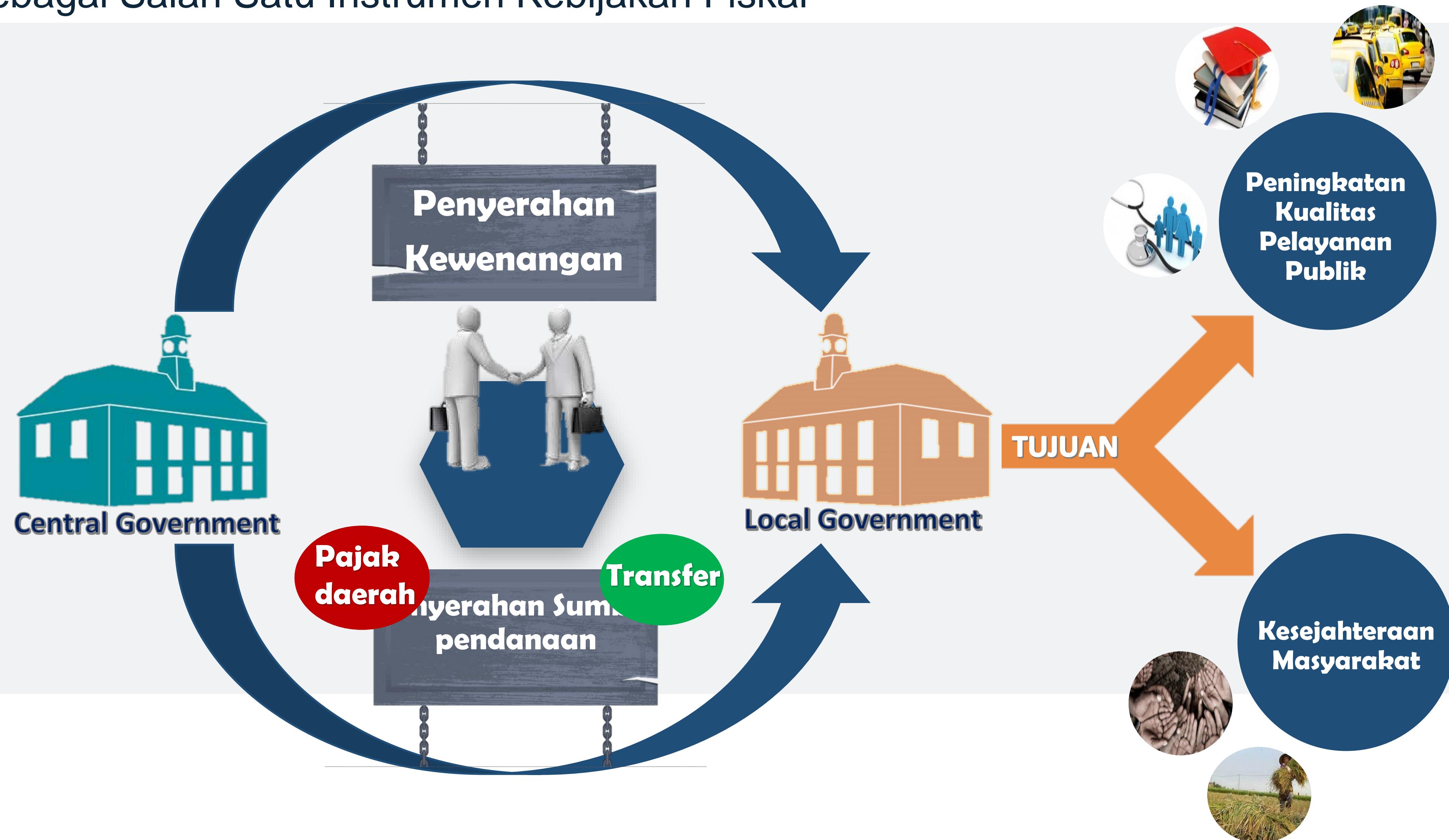
Pengelolaan defisit dan pembiayaan yang pruden dan produktif – dengan defisit dan utang salah satu paling rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi



KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN POTRET ACEH

KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

Sebagai Salah Satu Instrumen Kebijakan Fiskal



PENGUATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

Penguatan Perpajakan Daerah

UU 28/2009 ttg Pajak Daerah & Retribusi Daerah

- **Closed list jenis-2 pajak daerah yg dapat dipungut**
→ **kepastian bagi masyarakat**
- **Penambahan jenis pajak baru (BPHTB, PBB P2, Pajak Rokok)** → **penguatan PAD**
- **Diskresi penetapan tarif (sesuai range dlm UU)** → **strategi kebijakan daerah**

Revisi UU 28/2009

- **Penyederhanaan jenis-2 pajak daerah**
- **Modernisasi aqdmministrasi perpajakan daerah**
- **Pengendalian Perda Perpajakan daerah yg distortif dan/atau tidak efektif**



Penguatan Transfer ke Daerah

Kuantitas transfer

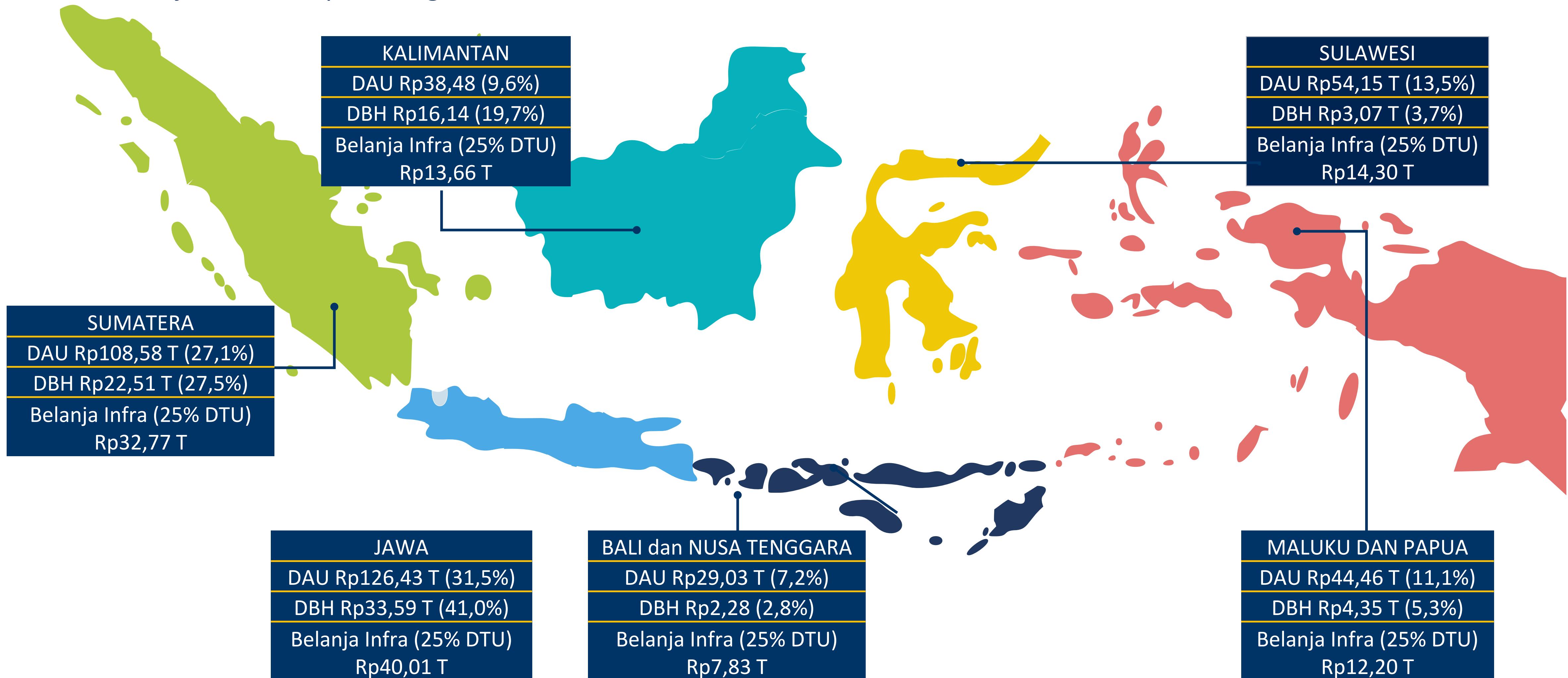
- **Jumlah terus ditingkatkan, bahkan melebihi porsi belanja K/L**
- **Pagu DAU tidak Final (disesuaikan PDN dlm APBNP)**
- **Penyesuaian alokasi DAU sbg konsekuensi pengalihan kewenangan**

Peningkatan kualitas Transfer

- **Penggunaan DAU dan DBH minimal 25% untuk infrastruktur layanan publik**
- **Penyaluran Dana Transfer berbasis kinerja pelaksanaan di daerah**
- **Penguatan monev earmarked transfer**

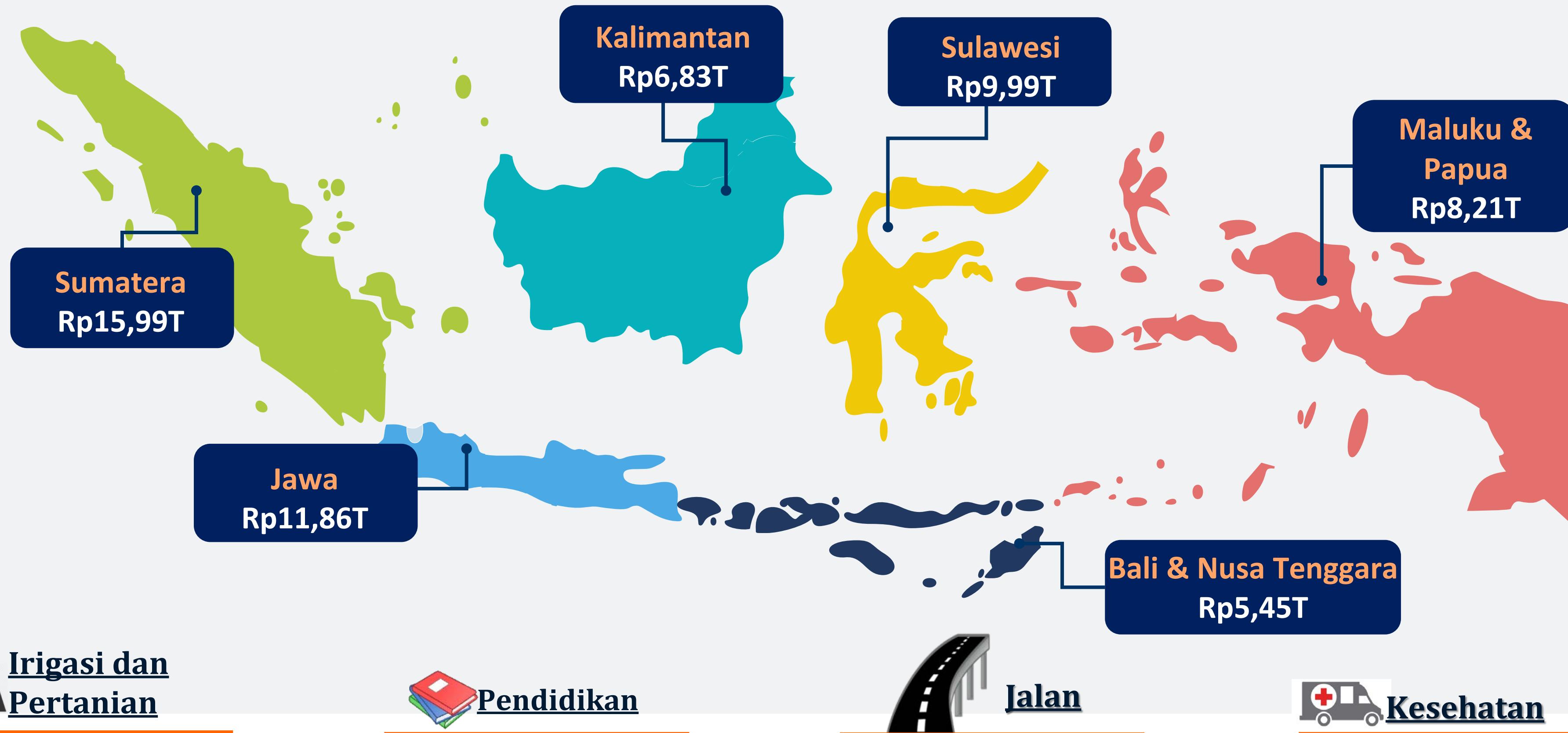
SEBARAN ALOKASI DTU (DAU & DBH) 2017

Minimal 25% dari Alokasi Dana Transfer Umum (DTU) berupa DAU dan DBH harus dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur ...



SEBARAN ALOKASI DAN TARGET OUTPUT DAK

DAK Fisik untuk peningkatan penyediaan layanan dasar publik di masyarakat ...
FISIK 2017



Irigasi dan Pertanian

- Baru : 5.000 Ha
- Rehab : 755.200 Ha
- 10.000 unit embung

Pendidikan

- Rehab Ruang Belajar: 27.140 unit
- Ruang Kelas Baru: 3.590 unit

Jalan

Kondisi Mantap:
Provinsi: 71,75%
Kab/Kota: 60,76%

Kesehatan

- Rumah Sakit : 453 unit
- Puskesmas : 5.059 unit

Perumahan

49.000 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Sanitasi

- ◆ 169.500 SR
- ◆ 1.026 unit IPAL USK
- ◆ 348.000 unit tangki septic individu
- ◆ TPS 3R sebanyak 700 unit.

Air Minum

- 448 SPAM bagi 716.352 rumah tangga.
- Akses air minum layak bagi 688.436 rumah tangga

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN



INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME DI

Capaiannya dari indikator IPM di Aceh berada di atas rata-rata nasional, namun penanganan masalah kemiskinan dan tingkat pengangguran harus ditingkatkan

Daerah	Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)		Angka Partisipasi Murni (APM) SD		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
	2011	2015	2011	2015	2011	2015	2011	2015	2011	2015
Provinsi Aceh	19,48	17,11	8,37	9,93	92,51	97,99	74,87	85,55	67,45	69,45
Rata-rata Nasional	12,56	11,70	6,36	5,98	87,65	95,99	64,02	75,61	64,24	68,58

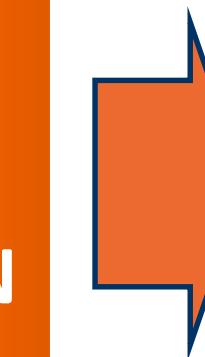
Indikator kemiskinan dan pengangguran di Aceh perlu menjadi perhatian, karena masih relatif tinggi (di atas rata-rata nasional)

Indikator pendidikan relatif baik bahkan di atas rata-rata nasional untuk tahun 2011 dan 2015, demikian juga IPM masih relatif baik.

PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2016 SE-PROV NAD

Daerah	Hasil Pemeringkatan Daerah 2016	
	Skor	Kategori
Prov. Aceh	78,63	BB+
Kab. Aceh Barat	61,18	CC+
Kab. Aceh Besar	75,18	BB+
Kab. Aceh Selatan	71,16	BB
Kab. Aceh Singkil	63,27	BB-
Kab. Aceh Tengah	75,91	BB+
Kab. Aceh Tenggara	68,87	BB
Kab. Aceh Timur	69,14	BB
Kab. Aceh Utara	64,33	BB-
Kab. Bireuen	73,21	BB
Kab. Pidie	68,69	BB
Kab. Simeulue	70,03	BB
Kab. Gayo Lues	63,41	BB-
Kab. Aceh Barat Daya	67,35	BB-
Kab. Aceh Jaya	69,46	BB
Kab. Nagan Raya	69,74	BB
Kab. Aceh Tamiang	64,71	BB-
Kab. Bener Meriah	75,65	BB+
Kab. Pidie Jaya	82,83	AA-

INDIKATOR KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DASAR PUBLIK



INDIKATOR KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

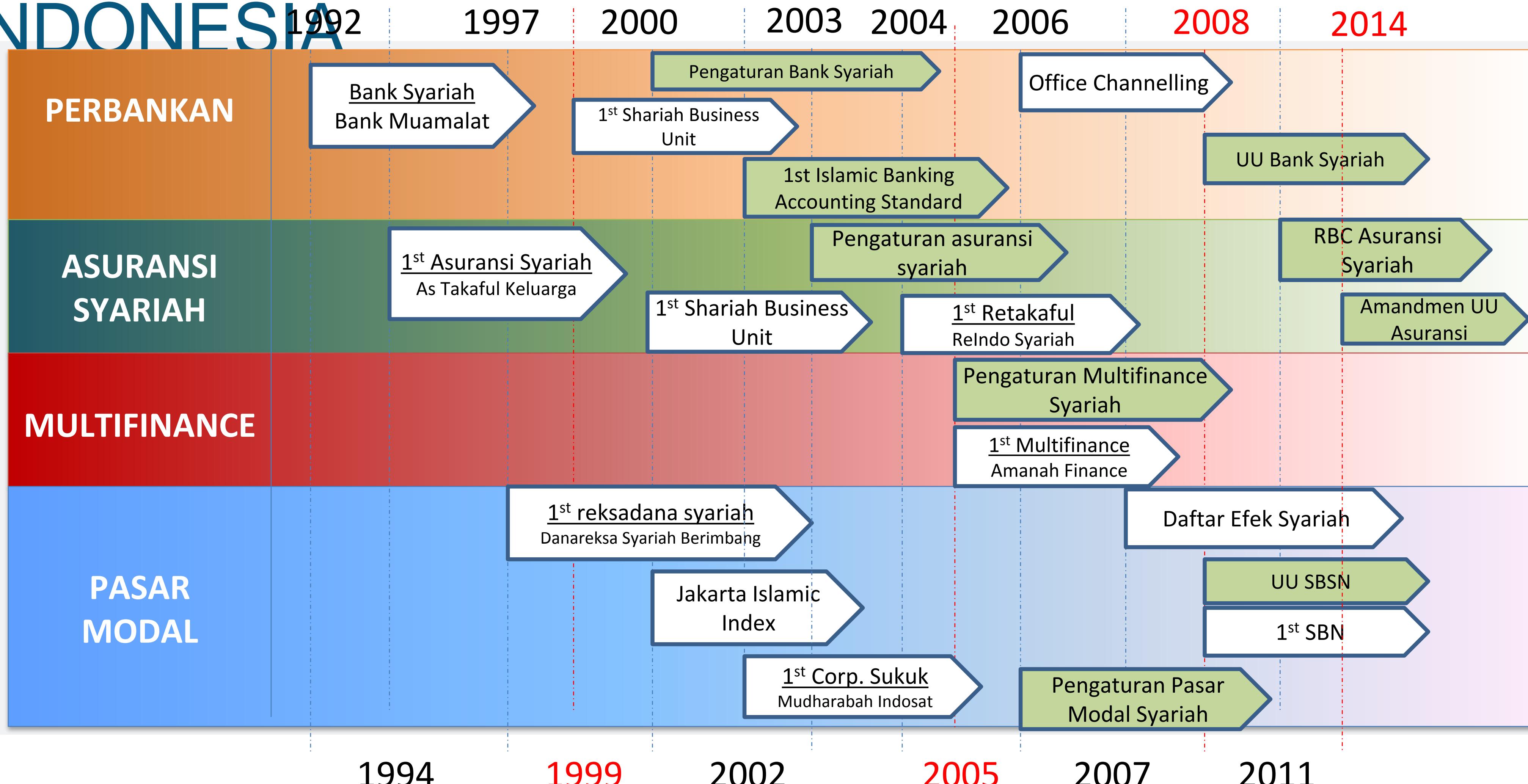
HASIL PEMERINGKATAN

- 1 Daerah dalam kategori Sangat Baik (AA-)
- 17 Daerah dalam kategori Baik (BB);
- 1 Daerah dalam kategori Cukup (CC+).

13 Kab/Kota mendapatkan ***reward***
alokasi Dana Insentif Daerah (DID)
2017

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA



Sumber: IAEI

SUKUK NEGARA, INSTRUMEN ALTERNATIF UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN SYARIAH



PERANAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Aset perbankan syariah
4,83% dari total set
perbankan nasional

Aset asuransi
5,42% dari total aset
asuransi nasional

Aset pembiayaan syariah
5,54% dari total aset
pembiayaan nasional

Pangsa pasar Reksadana
syariah di pasar modal
8,52%

Pangsa pasar sukuk negara
13%

Pangsa pasar sukuk korporasi
3%

TANTANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

- 01) Rendahnya modal lembaga keuangan & persaingan di era MEA
- 02) Jenis produk terbatas dan harga kurang kompetitif
- 03) Keterbatasan jaringan distribusi dan jangkauan
- 04) Pelayanan kurang optimal
- 05) Belum ada standardisasi model dan polis takaful
- 06) Peluang investasi asuransi syariah terbatas
- 07) Pasar sekunder sukuk yang belum likuid dan dalam

ARAH KEBIJAKAN ROADMAP SYARIAH

Arah Kebijakan Roadmap Perbankan Syariah

1. Memperkuat sinergi kebijakan otoritas dengan Pemerintah & *stakeholders*.
2. Memperkuat permodalan, skala usaha serta efisiensi
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
4. Memperbaiki kualitas dan layanan produk
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat
7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan

Arah Kebijakan Roadmap Pasar Modal Syariah

1. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi.
2. Peningkatan *supply & demand* produk.
3. Pengembangan SDM dan TI
4. Promosi dan edukasi.
5. Koordinasi dengan Pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.

Arah Kebijakan Roadmap IKNB Syariah

1. Meningkatkan peran industri keuangan non bank (IKNB) syariah dalam perekonomian dan keuangan inklusif.
2. Mewujudkan IKNB syariah yang tangguh, terkelola dan stabil.
3. Meningkatkan dukungan SDM, infrastruktur dan TI.

REFORMASI STRUKTURAL & KESIMPULAN

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN DAYA BELI DAN INVESTASI

1 9 Sept 15

- Deregulasi
- Akselerasi proyek strategis
- Mendorong pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2 29 Sept 15

- Peluncuran program perizinan 3 jam
- Pembebasan PPN untuk industri transportasi
- Fasilitas logistik terintegrasi

3 7 Oct 15

- Penurunan harga BBM dan TDL
- Penyederhanaan izin investasi
- Perluasan basis penerima kredit UMKM

4 15 Oct 15

- Sistem upah yang simpel dan adil
- Kredit UMKM yang mudah dan terjangkau

5 23 Oct 15

- Penurunan pajak revaluasi aset
- Penghapusan pajak berganda REITs

6 5 Nov 15

- Pembangunan KEK
- Perbaikan suplai air bersih
- Penyederhanaan izin impor untuk farmasi

7 4 Dec 15

- Percepatan proses sertifikasi tanah
- Incentif pajak untuk industri padat karya

8 21 Dec 15

- One Map Policy
- Pembangunan pengolahan sumber daya alam (refinery)
- Incentif untuk industri penerangan

9 27 Jan 16

- Percepatan konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan
- Stabilisasi harga daging
- Deregulasi sektor logistik

10 11 Feb 16

- Perbaikan kemudahan berinvestasi (ease of doing business)

11 29 Mar 16

- Incentif kredit usaha REIT berbasis ekspor
- Indonesia Single Risk Mgmt (ISRM)
- Pembangunan industri farmasi

12 28 Apr 16

- Penyederhanaan izin, prosedur, durasi dan biaya memulai bisnis

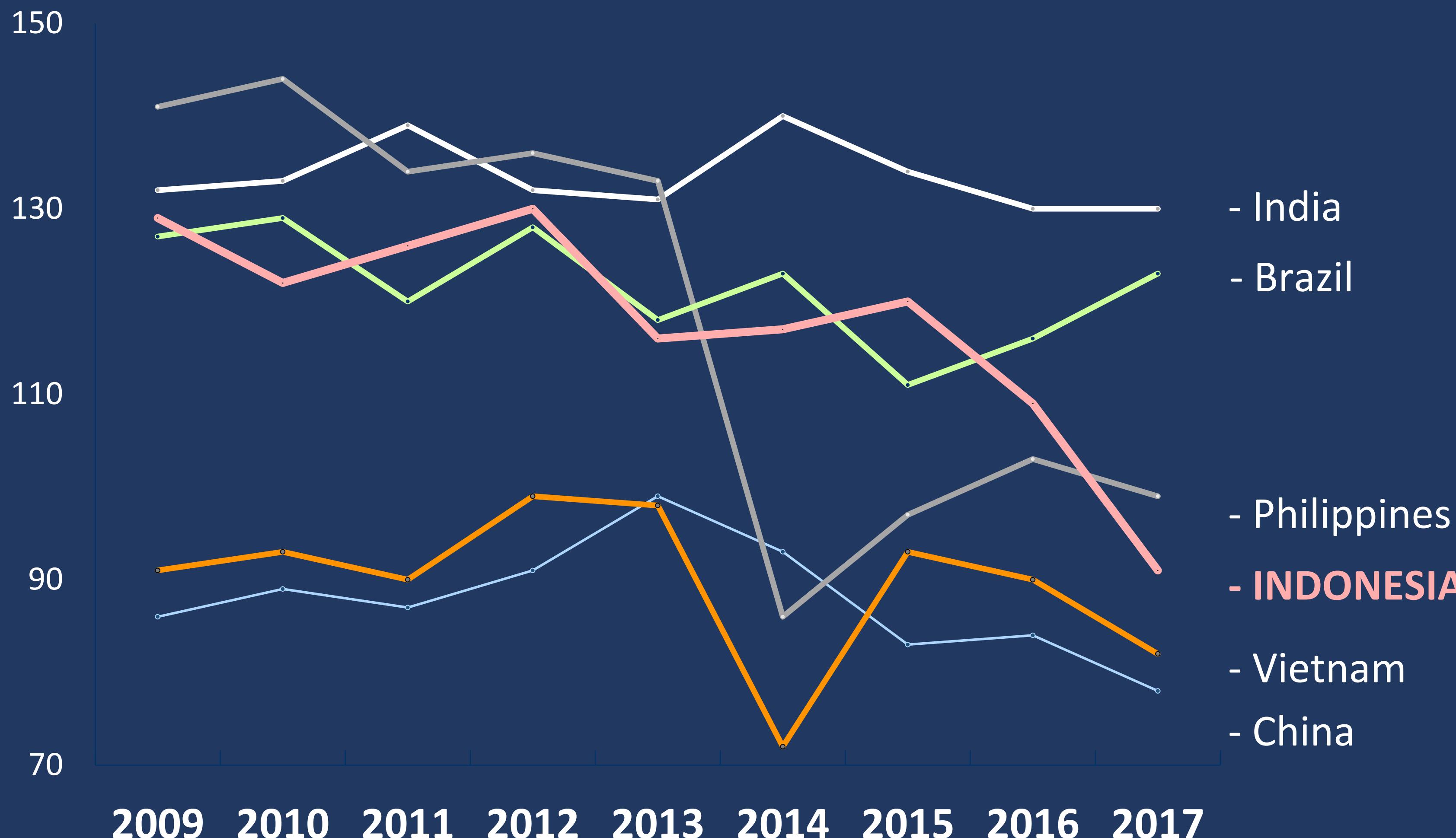
13 24 Aug 16

- Percepatan pembangunan rumah murah bagi MBR melalui kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan

14 10 Nov 16

- Pembiayaan E-commerce
- Incentif pajak bagi pelaku usaha digital
- Perlindungan konsumen
- Perbaikan logistik

PERBAIKAN SIGNIFIKAN POSISI EASE OF DOING BUSINESS



Source: World Bank Ease of Doing Business Report 2017

#91

Dari 190 negara

Skor: 61.52 (↑3.4)



Indonesia is amongst the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All

- World Bank Group, Press Release
EODB 2017

Kesimpulan...EKONOMI INDONESIA SEHAT & PROSPEKTIF

Fundamental Ekonomi



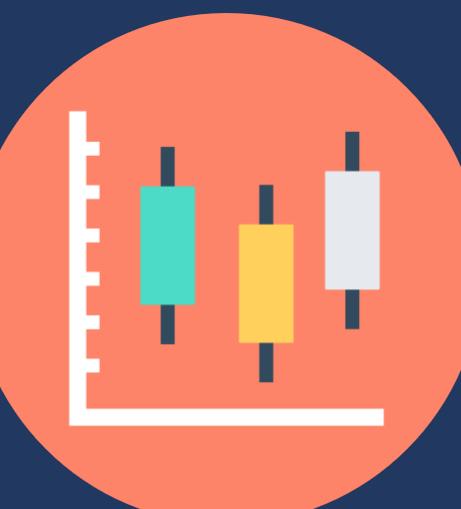
- Fundamental ekonomi sehat
- Pertumbuhan menjanjikan
- Investasi meningkat

SDA & SDM



- Populasi terbesar ke-4 di dunia
- *Growing middle income class*
- Negara demokrasi ke-3 terbesar di dunia
- Stabilitas politik
- Sumber daya alam melimpah

Komitmen Reformasi



- Reformasi struktural
- Reformasi fiskal
- APBN lebih kredibel dan produktif

Persepsi Investor



- Perbaikan *Ease of Doing Business*
- *Investment grade* dari Moody's & Fitch
- Penerbitan surat utang pemerintah selalu diminati
- Penilaian positif dari institusi internasional (e.g. IMF Article IV)

TERIMA KASIH

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kuliah Umum
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, 5 Januari 2017

